

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RENJA
KECAMATAN TEMPURSARI**



**TAHUN
2021**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut, kepala BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana kinerja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.1.Pengertian Renja

Dokumen Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rencana Kerja merupakan pengejawantahan dan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Tempursari menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang akan dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

1.1.2.Proses Penyusunan Renja

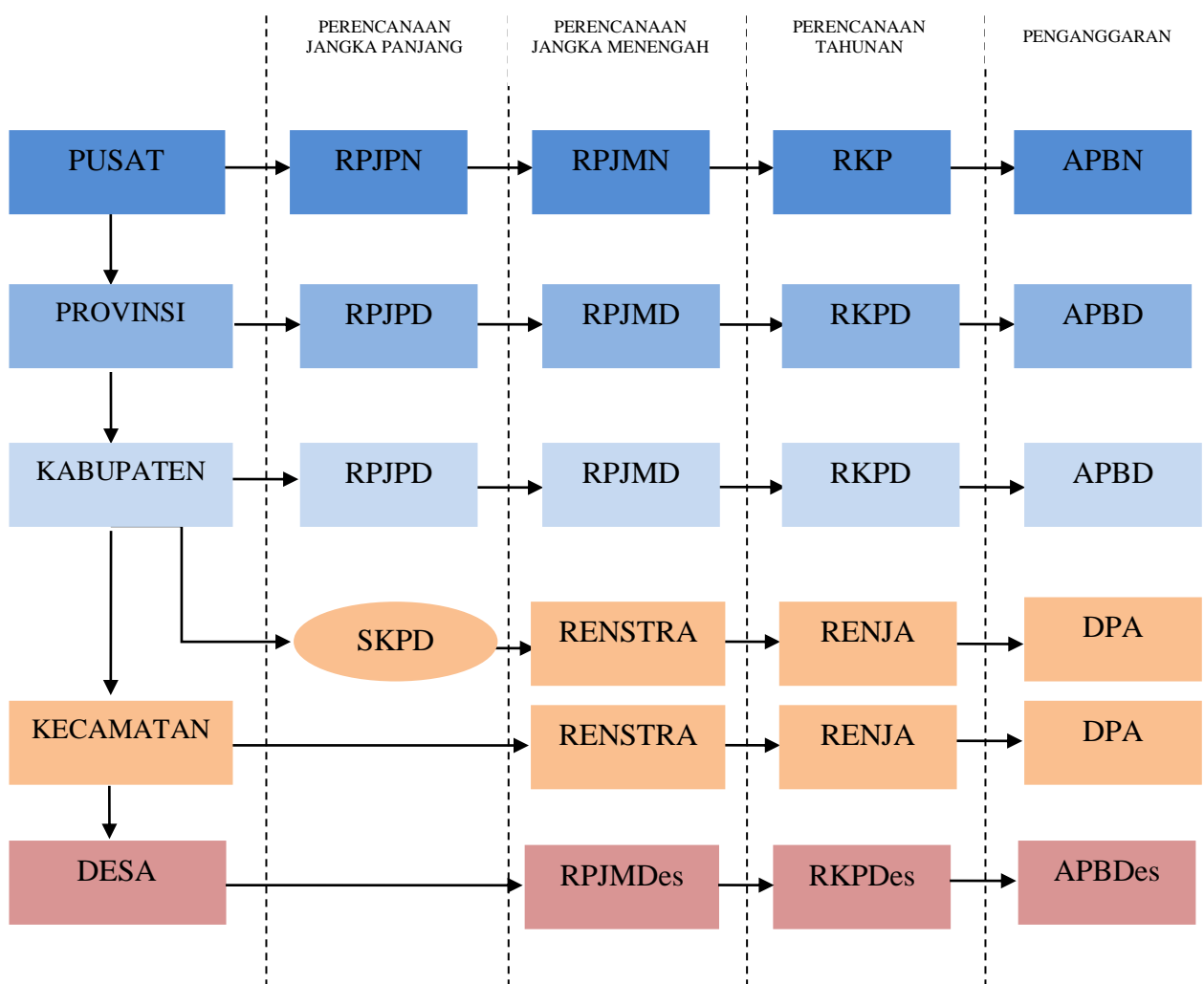
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2.Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 -2023 yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019 – 2023.

Renstra OPD Tahun 2019 – 2023 di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat di ilustrasikan pada gambar dibawah ini, gambar tersebut mengilustrasikan pola hubungan antar dokumen perencanaan pada level pemerintah pusat sampai dengan desa dan dapat kita analisa keterkaitan antar seluruh dokumen perencanaan.



Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 - 2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2019-2023.
16. Peraturan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tempursari adalah sebagai Dokumen Rencana Kinerja untuk 1 (Satu) Periode Tahun Anggaran

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Tempursari adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dengan prakiraan maju untuk Tahun Anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (Lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

Berisi tentang :Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2021;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang :Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang : uraian penutup.

Lampiran

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2019) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

d. Faktor Penyebab program atau Kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

Capaian Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat pada tahun 2019 hanya mencapai 85,05% dari target yaitu 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 97,75%. Hal ini dikarenakan keterlambatan

pelayanan pada pencetakan KTP yang dipicu oleh keterbatasan blangko e-KTP sehingga menghambat 984 berkas layanan.

Adapun capaian Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan yaitu 10%, tidak mencapai target keluaran sebesar 86% karena belum mampu maksimal dapat mengakomodir usulan pembangunan kecamatan ke musrenbang kabupaten karena usulan pembangunan kecamatan tidak menjadi prioritas kabupaten.

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat juga tidak berjalan sesuai target realisasi keuangan dengan capaian 74.26% secara keseluruhan karena belum optimalnya petugas dalam memahami capaian dan hasil dari kegiatan tersebut, sehingga penyerapan belum memenuhi target keluaran. (data laporan Pembangunan per Desember 2019)

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.05.3.05.24.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	433.182.000	355.454.455	368.051.660	355.454.455	96%	419.343.000		
3.05.3.05.24.01.021	Pelayanan Administrasi dan Operasioanal Perkantoran	Jumlah jenis pelayananan administrasi dan oprasional perkantoran	433.182.000	355.454.455	368.051.660	355.454.455	96%	419.343.000		
3.05.3.05.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	741.029.000	464.683.264	475.429.340	464.683.264	97%	69.788.000		
3.05.3.05.24.02.045	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	651.299.000	332.683.700	341.770.000	332.683.700	97%	187.983.000		
3.05.3.05.24.02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	89.730.0000	131.999.564	133.659.340	131.999.564	98%	87.630.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.05.3.05.24.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan	11.260.000	8.126.500	11.140.000	8.126.500	72%	6.910.000		
3.05.3.05.24.06.003	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar keuangan	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	100%	1.064.000		
3.05.3.05.24.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	8.220.000	1.976.000	1.975.000	1.976.000	100%	1.976.000		
3.05.3.05.24.39.003	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	3.870.000	5.086.500	8.100.000	5.086.500	62%	3.870.000		
3.05.3.05.24.39	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi sesuai ketentuan, persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi, persentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi, persentase usulan desa yang difasilitasi, persentase pelayanan prijin dan non perijinan yang ditindaklanjuti	514.529.000	471.098.000	480.603.000	471.098.000	98%	397.839.000		

3.05.3.05.20. 39.007	Fasilitasi Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Presentase Pelayanan Permohonan Perizinan Yang ditindak Lanjuti	88.620.000	89.790.000	89.796.000	89.790.000	99%	75.660.000		
3.05.3.05.20. 39.003	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Persentase penyusunan dokumen administrasi pemerintahan dan keuangan desa yang di tindak lanjuti	200.000.000	198.273.000	204.423.000	198.273.000	99%	198.800.000		
3.05.3.05.20. 39.004	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang difasilitasi	208.368.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100%	3.375.000		
3.05.3.05.20. 39.005	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	115.354.000	164.885.000	157.634.000	164.885.000	104%	115.354.000		
3.05.3.05.20. 39.006	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase usulan pembangunan desa yang terakomodir	5.241.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	100	4.650.000		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tempursari dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2019–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang

NO	INDIKATOR	TARGET					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catan Analisis
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	
1	Nilai IKM Kecamatan	75	75	75	75	86	84,29	-	87	88	
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	87%	88%	
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	87%	88%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Nilai IKM Kecamatan	Kuantitatif	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	Penghitungan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Tempursari atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survey secara berkala
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$	Data bersumber dari seluruh Seksi dan Subag terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi secara berkala
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Kuantitatif	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen})} \times 100 \%$	Data bersumber dari Seksi Pemerintahan terhadap laporan desa yang telah diselesaikan.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala (Tribulan)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan Camat sebagai Kepala OPD tingkat Kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, berdasar kepada regulasi yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan yang harus dituntaskan dengan pendekatan Menggunakan analisis lingkungan strategi (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat),

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Tempursari didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal	belum terpenuhinya Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
	Kemampuan personal petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan masih belum optimal karena kurangnya bimtek dan pelatihan terkait pelayanan publik	Kurang maksimalnya kualitas pelayanan publik
	kesadaran untuk tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas masih belum maksimal	
	Tingkat kepuasan pelayanan publik belum mencapai Harapan IKM	
	Kurangnya Inovasi pelayanan publik	
	Administrasi Pemerintahan Desa tidak terselesaikan secara tepat waktu	kurang optimal pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa

	kurang maksimalnya tingkat akuntabilitas administrasi keuangan desa	
	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih secara optimal	sinergitas kinerja FORKOMPIMKA serta SDM personil Linmas dan Satgas Kamdes yang belum memadai
	SDM Personil Satgas Keamanan Desa belum terbina dan terlatih secara optimal	
	Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum belum dilaksanakan secara optimal	
	Pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat belum terfasilitasi dan terkoordinasi secara optimal	Belum optimalnya peran petugas dalam memfasilitasi kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat belum terfasilitasi dan terkoordinasi secara optimal	
	Pembangunan dan program pemerintah yang belum terealisasi secara tepat sasaran dan normatif	
	Sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah belum terfasilitasi dan terkoordinasi	Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif dari masyarakat serta penanggulangan kemiskinan
	Bantuan Sosial pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan kurang terfasilitasi dan terkoordinasi	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (PERUBAHAN)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	1,768,978,057	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	1,768,978,057	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Kecamatan	100%	6,650,750		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Kecamatan	100%	6,650,750	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	549,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	549,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,192,750		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,192,750	

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,998,000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,998,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1,251,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1,251,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	3 Dokumen	660,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	3 Dokumen	660,000	
			Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1 Fasilitasi	-			Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1 Fasilitasi		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan	100%	1,213,973,207	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan	100%	1,213,973,207	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 ASN	1,191,524,407		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 ASN	1,191,524,407	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan	1 Fasilitasi	20,026,800		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan	1 Fasilitasi	20,026,800	

			tugas ASN				tugas ASN			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumentasi	270,000		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumentasi	270,000
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD	1 kegiatan				Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD	1 kegiatan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	1,346,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	1,346,000
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	2 laporan	501,000		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	2 laporan	501,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	4 Jenis	305,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	4 Jenis	305,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	1,296,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	1,296,000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 dokumen	238,000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 dokumen	238,000

		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	2 laporan	-		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	2 laporan		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	1 fasilitas	1,058,000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	1 fasilitas	1,058,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100%	186,175,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100%	186,175,600	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 jenis	5,064,400		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 jenis	5,064,400	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	35 Jenis	26,156,600		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	35 Jenis	26,156,600	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis	1,022,800		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis	1,022,800	
			jumlah fasilitas penggandaan dokumen	2 Fasilitas				jumlah fasilitas penggandaan dokumen	2 Fasilitas		

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi	6,358,800		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi	6,358,800	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	3 Fasilitasi	146,173,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	3 Fasilitasi	146,173,000	
			Jumlah fasilitasi korrordinasi dan konsultasi SKPD	1 Fasilitasi				Jumlah fasilitasi korrordinasi dan konsultasi SKPD	1 Fasilitasi		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis	1,400,000		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis	1,400,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	88%	11,416,400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	88%	11,416,400	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 Jenis	11,416,400		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 Jenis	11,416,400	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	88%	247,631,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	88%	247,631,800	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	1 Fasilitas	18,000,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	1 Fasilitas	18,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	46,415,800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	46,415,800	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitas	183,216,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitas	183,216,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	88%	101,834,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	88%	101,834,300	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan	40,579,300		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan	40,579,300	

		Dinas Operasional atau Lapangan					Lapangan				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 Jenis	13,450,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 Jenis	13,450,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 jenis	47,805,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 jenis	47,805,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88%	22,542,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88%	22,542,000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat		Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintah	88%	900,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat	88%	900,000	

	Kecamatan		ahan tingkat kecamatan					kecamatan			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 Laporan	900,000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 Laporan	900,000	
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase fasilitasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	88%	330,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase fasilitasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	88%	330,000	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	2 Laporan	330,000		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	2 Laporan	330,000	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang		88%	21,312,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	0	88%	21,312,000	

	kepada Camat	dilimpahkan									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 rekomendasi	2,112,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 rekomendasi	2,112,000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	7 Dokumen	4,152,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	7 Dokumen	4,152,000	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	6 Dokumen	15,048,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	6 Dokumen	15,048,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	88%	84,441,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	88%	84,441,000	

1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	88%	84,441,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	88%	84,441,000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 desa	4,941,000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi srenbang	7 desa	4,941,000	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	7 usulan	600,000		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	7 usulan	600,000	

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	10 kegiatan	78,900,000	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	10 kegiatan	78,900,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase pemenuhan upaya trantibum	88%	1,400,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase pemenuhan upaya trantibum	88%	1,400,000	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	88%	1,400,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	88%	1,400,000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	jumlah personil linmas terlatih trantibum	140 personil	1,400,000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	jumlah personil linmas terlatih trantibum	140 personil	1,400,000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		persentase pemenuhan urusan pemerintah	88%	9,180,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	88%	9,180,000	

	UMUM		an umum			UMUM		umum		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase fasilitasi urusan pemerintah an umum	88%	9,180,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	88%	9,180,000
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimca m	1 kegiatan	9,180,000		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	1 kegiatan	9,180,000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		persentase desa tertib administra si	88%	178,320,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		persentase desa tertib administrasi	88%	178,320,000
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase fasilitasi penyeleng garaan pemerintah an desa	88%	178,320,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase fasilitasi penyelenggar aan pemerintahan desa	88%	178,320,000
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah an Desa	jumlah desa terbina penyeleng garaan pemerintah an desa	7 desa	172,800,000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggar aan pemerintahan desa	7 desa	172,800,000

		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah yang melaksanakan penjarangan perangkat desa	2 Desa	5,520,000		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah yang melaksanakan penjarangan perangkat desa	2 Desa	5,520,000	
--	--	---	---	--------	-----------	--	---	---	--------	-----------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Tempursari. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

Tabel T-C.32

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2021
KABUPATEN LUMAJANG**

Kecamatan Tempursari

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	3 Dokumen	
				Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1 Fasilitasi	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumentasi	
				Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD	1 kegiatan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	
			Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	2 laporan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	4 Jenis	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 dokumen	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	2 laporan	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	1 fasilitasi	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	2 laporan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 jenis	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	35 Jenis	

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis	
				jumlah fasilitas penggandaan dokumen	2 Fasilitas	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 Fasilitas	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD	3 Fasilitas	
				Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Fasilitas	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 Jenis	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	1 Fasilitas	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitas	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 Jenis	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 jenis	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 Laporan	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	2 Laporan	

			Prasarana Pelayanan Umum			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 rekomendasi	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	7 Dokumen	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	6 Dokumen	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan n Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 desa	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	7 usulan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	10 kegiatan	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	jumlah personel linmas terlatih trantibum	140 personel	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	1 kegiatan	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 desa	

			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah yang melaksanakan penjarangan perangkat desa	2 Desa	
--	--	--	---	---	--------	--

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);.
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

1. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh.Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan sosial)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2019 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tempursari mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Tempursari untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatnya kepuasan masyarakat.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tempursari selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Tempursari, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Kepemerintahan yang baik ditetapkan 1 (satu) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.
 - a. Nilai IKM Kecamatan;
 - b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
 - c. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu;

3.2.3. Strategi dan kebijakan

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung;
- b. Mengoptimalkan peran aparatur kecamatan yang ada dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi pemerintahan;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. Meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan;
- e. Mengoptimalkan peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa ;
- f. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

- g. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/Musrenbang;
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa.

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Kecamatan Tempursari adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Tempursari;
2. Melakukan penambahan gedung dan mengoptimalkan Sarana gedung yang tersedia;
3. Mengoptimalkan Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian
4. Meningkatkan kemampuan IT personil pada setiap seksi dan bagian dengan penyediaan fasilitas IT;
5. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing aparatur;
6. Mengoptimalkan prasarana fasilitas IT yang ada dalam penyelesaian tugas dan fungsi;
7. Mempersingkat alur pengurusan Administrasi kependudukan ;
8. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan;
9. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan;
10. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan;
11. Mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat;
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan;
13. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif ;
14. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran aktif masyarakat dalam pembangunan ;
15. Meningkatkan Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan ;

16. Mengoptimalkan koordinasi aparaturn pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan;
17. Mengoptimalkan Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparaturn pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan.

Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

3.2.4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Seiring dengan misi yang ditetapkan Kecamatan Tempursari, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
- c. Tersedianya aparaturn yang profesional dan berkualitas;
- d. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- e. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

3.2.5. Program

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target Kinerja 2021
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	88
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$	88 %
			Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen})} \times 100 \%$	88 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Tempursari diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b) Koodinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang**

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1,768,978,057	DAU		100%	2,453,753,688
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Kecamatan	100%	6,650,750			100%	8,300,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	549,000			3 Jenis	600,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,192,750			1 Dokumen	2,400,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,998,000			1 Dokumen	2,200,000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-			1 Dokumen	500,000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-			1 Dokumen	500,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1,251,000			1 Dokumen	1,350,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	3 Dokumen	660,000			3 Dokumen	750,000

			Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1 Fasilitasi	-		1 Fasilitasi	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan	1	1,213,973,207		100%	1,337,331,848
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 ASN	1,191,524,407		13 ASN	1,310,676,848
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi	20,026,800		2 Fasilitasi	23,000,000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1 Fasilitasi	-		1 Fasilitasi	500,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumentasi	270,000		1 Dokumentasi	290,000
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD	1 kegiatan			1 kegiatan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	1,346,000		1 jenis	1,480,000
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	2 laporan	501,000		2 laporan	550,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	4 Jenis	305,000		4 Jenis	335,000
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah jenis laporan prognosis	1 Jenis	-		1 Jenis	500,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	1,296,000		100%	1,921,000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan	2 dokumen	238,000		2 dokumen	261,000

	SKPD	BMD						
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	2 laporan	-			2 laporan	500,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	1 fasilitas	1,058,000			1 fasilitas	1,160,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	0%	-			100%	3,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	-	-			1 jenis	3,000,000
		jumlah jenis atribut dinas yang disediakan	-					
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	-	-			13 ASN	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100%	186,175,600			100%	205,005,840
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 jenis	5,064,400			7 jenis	5,570,840
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	35 Jenis	26,156,600			35 Jenis	28,770,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis	1,022,800			2 jenis	1,125,000
		jumlah fasilitas penggandaan dokumen	2 Fasilitas				2 Fasilitas	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 Fasilitas	6,358,800			1 Fasilitas	8,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD	3 Fasilitas	146,173,000			3 Fasilitas	160,000,000
		Jumlah fasilitas korrordinasi dan konsultasi SKPD	1 Fasilitas				1 Fasilitas	

		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis	1,400,000			2 Jenis	1,540,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	88%	11,416,400			89%	225,000,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	0	-			1 Kendaraan	30,000,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 Jenis	11,416,400			2 Jenis	15,000,000
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis aset tetap yang disediakan	0 Jenis	-			6 Jenis	20,000,000
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan	0 Jenis	-			5 Jenis	10,000,000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor/bangunan lain yang dibangun	0 Jenis	-			1 Jenis	100,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibangun	0 Jenis	-			1 Jenis	50,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	88%	247,631,800			89%	281,300,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1 Fasilitasi	18,000,000			1 Fasilitasi	19,800,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	46,415,800			4 Rekening	51,500,000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah fasilitasi jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	-			2 Kegiatan	10,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitasi	183,216,000			2 Fasilitasi	200,000,000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	88%	101,834,300			89%	389,395,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan	40,579,300			8 Kendaraan	44,600,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 Jenis	13,450,000			12 Jenis	14,795,000
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis aset tetap lain yang dipelihara	0	-			4 Jenis	10,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 jenis	47,805,000			2 Jenis	300,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	0	-			3 Jenis	20,000,000
			Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi	0				3 Jenis	
	Penataan Organisasi		Persentase fasilitasi penataan organisasi	100%	-			100%	2,500,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen				1 Laporan	2,500,000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88%	22,542,000	DAU		89%	32,285,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	88%	900,000			89%	990,000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 Laporan	900,000			1 Laporan	990,000

		Kecamatan							
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase fasilitasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	88%	330,000			89%	365,000
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	2 Laporan	330,000			2 Laporan	365,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88%	-			89%	7,500,000
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	1 Laporan	-			1 Laporan	7,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	88%	21,312,000			89%	23,430,000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 rekomendasi	2,112,000			1 Rekomendasi	2,320,000

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	7 Dokumen	4,152,000			7 Dokumen	4,560,000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	6 Dokumen	15,048,000			6 Dokumen	16,550,000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	88%	84,441,000	DAU		89%	87,380,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	88%	84,441,000			89%	87,380,000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 desa	4,941,000			7 Desa	5,430,000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	7 usulan	600,000			7 usulan	660,000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	10 kegiatan	78,900,000			10 kegiatan	81,290,000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase pemenuhan upaya trantibum	88%	1,400,000	DAU		89%	66,540,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	88%	1,400,000			89%	66,540,000

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	jumlah personil linmas terlatih trantibum	140 personil	1,400,000			140 personil	1,540,000
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah fasilitasi, harmonisasi hubungan toma, toga	1 Fasilitasi	-			1 Fasilitasi	65,000,000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	88%	9,180,000	DAU		89%	10,098,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	88%	9,180,000			89%	10,098,000
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	1 kegiatan	9,180,000			1 kegiatan	10,098,000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		persentase desa tertib administrasi	88%	178,320,000	DAU		89%	196,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	88%	178,320,000			89%	196,000,000
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 desa	172,800,000			7 desa	190,000,000

		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah yang melaksanakan penjaringan perangkat desa	2 Desa	5,520,000			3 Desa	6,000,000
--	--	---	---	--------	-----------	--	--	--------	-----------

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tempursari Tahun 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini:

**Program Utama dan Kegiatan
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
		2. Koorinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dan prasarana pelayanan umum
		3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja kecamatan 3. Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan vertical di wilayah kecamatan
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Rekomendasi pengangkatan

			dan pemberhentian perangkat desa
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penyediaan Bahan/Material
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan

			3. Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--	--

3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan fasillitasi kebutuhan operasional perkantoran	<u>Output :</u> Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis
			Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
			Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen
			Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	3 Dokumen
			Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik	1 Fasilitasi
			Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 ASN
			Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitasi
			Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumentasi
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntansi SKPD	1 kegiatan
			Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis
			Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	2 laporan
			Jumlah Jenis Laporan Keuangan	4 Jenis
			Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 dokumen
			Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	2 laporan
			Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	1 fasilitasi
			Jumlah Laporan rekonsiliasi	2 laporan

			BMD	
			Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 jenis
			Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	35 Jenis
			Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis
			jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	2 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi rakor SKPD	3 Fasilitasi
			Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD	1 Fasilitasi
			Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis
			Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 Jenis
			Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1 Fasilitasi
			jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening
			Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitasi
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan
			Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 Jenis
			Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 jenis
			<u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	88
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<u>Output :</u> Jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 Laporan
			jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	2 Laporan
			Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	1 rekomendasi
			jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	7 Dokumen
			jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	6 Dokumen
			<u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	88
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	<u>Output :</u> jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 desa
			jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	7 usulan
			Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	10 kegiatan

			<u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	88
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pemenuhan upaya trantibum	<u>Output :</u> jumlah personil linmas terlatih trantibum <u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	140 personil 88
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya pemenuhan urusan pemerintahan umum	<u>Output :</u> jumlah fasilitasi tugas forkopimcam Outcome : Nilai IKM Kecamatan	1 kegiatan 88
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya ketertiban administrasi desa	<u>Output :</u> jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 desa
			Jumlah yang melaksanakan penjarangan perangkat desa <u>Outcome :</u> Nilai IKM Kecamatan	2 Desa 88

3.3. Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tempursari Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.064.861.057,-** (Dua Miliar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah). Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2021.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Tempursari dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Kecamatan Tempursari.

Tempursari, November 2020

CAMAT TEMPURSARI

SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 19830621 200112 1 001

